



Peran Elite Adat Pada Pilkada Kabupaten Pinrang 2018

Eka Suhartono¹, Hasruddin Nur²

SMAN 6 Bulukumba, Universitas Sawerigading Makassar

¹Email: ekasuhartono.es@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Alasan elite adat ikut melibatkan diri pada pra Pilkada Kabupaten Pinrang 2018, (2) Peran elite adat pada proses Pilkada Kabupaten Pinrang 2018, (3) Proses adaptasi elite adat pasca Pilkada Kabupaten Pinrang 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dijabarkan secara deksriptif dengan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi literatur. Tehnik pemilihan subjek yang digunakan adalah *Purposive sampling*. Subjek penelitian ini adalah berjumlah 11 informan. Adapun validitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan beberapa temuan yaitu, Peran elite adat pada Pilkada Kabupaten Pinrang 2018 tidak sebatas pada pra Pilkada saja akan tetapi juga pada proses dan pasca Pilkada tersebut dilaksanakan. Alasan elite adat ikut melibatkan diri pada pra Pilkada Kabupaten Pinrang 2018 adalah untuk mempertahankan citra, kharisma dan jabatan yang diemban oleh golongan elite adat serta sebagai wujud pembuktian bahwa elite adat merupakan perwujudan seorang pemimpin. Peran elite pada Pilkada Kabupaten Pinrang 2018 adalah menjadi pusat pemetaan daerah yang merupakan basis dukungan, elite adat yang merupakan generalitas kemenangan akan wilayah dimana dia berkedudukan merupakan strategi instan tim pemenangan calon kepala daerah untuk memenangkan Pilkada. Selain itu peran lain elite adat disini adalah menjadi patron akan massa yang memihak dan percaya bahwa pilihan politik elite adat merupakan pilihan politiknya juga. Proses adaptasi elite adat pasca Pilkada Kabupaten Pinrang 2018 adalah bentuk respon elite adat pasca Pilkada dimana kondisinya ada pihak yang menang dan kalah, proses adaptasi ini diisi dengan berbagai startegi pendekatan untuk mendapatkan posisi terbaik di pemerintahan serta untuk pihak yang kalah akan berusaha melakukan pendekatan untuk terbebas dari sanksi politik dan tetap mendapatkan penghargaan dan kepercayaan dari massa yang dimiliki.

Kata Kunci : Peran elite adat; Kabupaten Pinrang; Pilkada; Politik.

Abstract. The study aims to discover (1) the reasons for the indigenous elite to get involved in the 2018 pre-Pilkada in Pinrang district, (2) the role of the indigenous elite in the 2018 Pilkada process in Pinrang district, (3) the adaptation process for the indigenous elite after the 2018 Pilkada in Pinrang district. This study employed qualitative approach, which described descriptively with data collection techniques used were observation, in-depth interviews, documentation, and literature study. The subject selection technique used was purposive sampling. The subjects of the study were 11 informants. The data validity of the study employed triangulation techniques. Based on the results of the study, several findings are discovered, namely, the role of the indigenous elite in the 2018 Pilkada in Pinrang district is not merely limited to the pre-Pilkada but also in the process and after Pilkada is carried out. The reasons for the indigenous elite to get involved in the 2018 pre-election in Pinrang district are to maintain the image, charisma, and position held by the indigenous elite and as a form of proof that the indigenous elite is the

manifestation of a leader. The role of the elite in the 2018 Pilkada in Pinrang district is to become the center for regional mapping which is the basis of support, the indigenous elite which is the generality of winning the area where it is located is an instant strategy for the winning team for regional head candidates to win the Pilkada. Apart from that, another role of the indigenous elite is to become a patron for the masses who take sides and believe that the political choice of the indigenous elite is their political choice. The adaptation process of the indigenous elite after the 2018 Pilkada in Pinrang district is a form of response of indigenous elite after Pilkada where the conditions are winner and losers. This adaptation process is filled with various approaches to get the best position in government and for the losing party will try to approach freedom from political sanctions and still get respect and trust from their masses.

Keywords: The role of the customary elite; Pinrang Regency; Pilkada; Political



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perubahan sistem perpolitikan Indonesia yang berakar pada sejarah dari masa prakolonial hingga masa reformasi seperti saat ini merupakan suatu wujud kesadaran yang dilakukan oleh pemerintah sebagai proses penyesuaian dari semakin berkembang serta semakin sadarnya masyarakat terhadap dunia dan wawasan politik yang ada. Saat ini masyarakat sudah semakin cerdas dalam menentukan arah gerak perpolitikan baik itu dalam skala internasional, nasional hingga dalam tataran pemerintah daerah. Kasus runtuhnya masa orde baru merupakan salah satu bukti bahwasanya masyarakat sudah mulai mengerti tentang bagaimana hal-hal baik yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan mereka sudah sadar bahwa tidak selamanya segala keputusan atau kebijakan itu baik untuk rakyat. Sistem sentralistik yang dianut pada masa orde baru berubah ke sistem desentralisasi yang mana merupakan salah satu amanat rakyat dari agenda reformasi.

Kebijakan otonomi daerah berbuah positif oleh masyarakat, dimana ini merupakan langkah awal dalam memandirikan serta merasakan hakikat demokrasi yang sebenarnya bukan hanya skala besar seperti nasional saja akan tetapi hingga tataran lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, dan di revisi

di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484 (Widjaja 2003:34).

Saat ini sudah menginjak 19 tahun peraturan tentang otonomi daerah diberlakukan pada hakikatnya sudah terasa banyak hal-hal positif yang menjadi buah akan regulasi tersebut akan tetapi, ada-ada saja hal-hal yang menyimpang selama masa berjalannya otonomi daerah tersebut dan dengan didukung oleh struktur sosial yang telah terbangun dimasyarakat lahirilah sistem structural fungsional dimana dari masyarakat hingga pemerintah mempunyai tugas masing-masing dan saling terkait sampai pada aspek kontrol dan pengawasan. Didalam struktur sosial masyarakat terdapat pembagian kelas-kelas

dengan perannya tersendiri, kelas sosial yang dimaksud seperti munculnya kelas patron dan klien dan juga seperti yang dijelaskan oleh Clifford Gertz dalam buku *The Religion Of Java* (Clifford Gertz, 1976) tentang pengkelasan santri, abangan, priyayi.

Elite adat mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mendorong demokratisasi ditingkat lokal, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan memberikan pemahaman demokrasi pada masyarakat yang lebih luas. Elite adat merupakan sebuah wujud fenomena sosial yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat daerah yang masih menjunjung tinggi kearifan lokalnya. Elite adat berfungsi sebagai pendorong serta delegasi pemerintah dalam proses timbal balik komunikasi serta regulasi untuk mewujudkan pemerintahan yang berdemokrat hingga tataran lokal. Elite adat yang merupakan bagian dari elite lokal merupakan sebuah kategorisasi dari mereka yang dinilai mempunyai garis keturunan bangsawan asli dari beberapa kerajaan yang dahulunya berdiri di wilayah Kabupaten Pinrang, diluar dari kelebihan lainnya baik itu segi kekuasaan, pendidikan, materil, religious, yang mana kelebihan tersebut dapat menjadi senjata untuk mempengaruhi orang lain atau yang lebih luas yaitu masyarakat dalam tataran lokal. Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Elite adat yang pada hakikatnya mempunyai pengaruh di masyarakat dewasa ini walaupun peran-peran serta status sosial mereka sedikit demi sedikit tergerus oleh semakin banyaknya tokoh-tokoh baru yang bermunculan dengan keunggulan-keunggulan baik itu materil ataupun pendidikan serta agama dan merasa bahwa dengan keunggulannya tersebut mereka bisa serta merta dikategorikan sebagai elite adat dan bagian dari elite lokal itu sendiri. Perubahan perilaku politik yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Pinrang, masyarakat yang merasa mempunyai keunggulan dan pengaruh sedikit-demi sedikit mulai mengumpulkan massa untuk dapat menjadi sebuah kesatuan baru dan mempunyai struktur-struktur untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Ada dua hal yang menjadi tujuannya yaitu untuk menaikkan derajat mereka menjadi golongan elite lokal serta menjadi peluru baru untuk menaikkan citra mereka di golongan elite yang mempunyai nama dan pengaruh besar.

Disisi lain elite adat yang tidak mempunyai kekuasaan lebih cenderung antusias untuk perluasan partisipasi politik, mengubah pola perilaku masyarakat serta terkadang membentuk sebuah partisipasi baru. Perilaku ini pada hakikatnya merupakan cara lama dalam untuk mengontrol keseimbangan kekuasaan. Elite adat yang mempunyai kekuasaan biasanya tidak begitu menyukai adanya upaya untuk memperluas partisipasi politik karena mereka cenderung berfikir bahwasanya setiap adanya sebuah perubahan dalam masyarakat merupakan sebuah ancaman bagi keseimbangan kekuasaan yang dimilikinya. Karakter elite adat dalam memanggul kekuasaan politik terkadang membuahkan konflik yang tak dapat dihindarkan, kasus seperti ini memperjelas bagaimana elite adat mengatur pola kekuasaan tradisionalnya, dan menjalankan kekuasaan modern untuk keperluan politiknya, dengan strategi tersebut terbentuk sistem sosial yang mempengaruhi hubungan antara sang elite adat dan pengikutnya.

Persoalan seperti ini kiranya terkaji dan berkaitan dalam etnis Bugis dan Makassar adalah konsep *Ajjoareng* dan *Joa* yang dikenal oleh tradisi Bugis, serta *Karaeng* dan *Taunna* yang dikenal oleh etnis Makassar. Konsep seperti ini adalah sebutan lain dari hubungan *patron-client* yang biasanya ada didalam struktur masyarakat pedesaan. Untuk konsep *patron-client* didalam struktur masyarakat Sulawesi Selatan merupakan wujud nilai *siri'* atau harga diri dan penghormatan serta menjadi landasan serta penggerak dalam ideologi masyarakat Bugis dan Makassar. Selanjutnya pada aspek hubungan patron- klien ini dapat diartikan sebagai wujud modal sosial yang dapat digunakan elite dalam mempertahankan kekuasaannya. Kondisi yang terjadi diatas menegaskan tentang keaktifan elite adat dalam roda perpolitikan di Kabupaten Pinrang, mereka dengan kekuatan charisma dan massanya melahirkan satu posisi baru yang harus diperhitungkan dalam mempengaruhi dan mendulang suara masyarakat.

Kehadiran elite adat dalam perpolitikan yaitu Pilkada Kabupaten Pinrang menciptakan beberapa permasalahan yaitu ketika elite adat mulai aktif berkecimpung dan masuk dalam roda perpolitikan, serta salah satu penguasa mempercayakan kepada mereka untuk mengumpulkan massa dan suara di masyarakat maka akan hadir kondisi dimana akan terjadi gesekan dibeberapa aspek. Adanya

permasalahan yang dikategorikan klasik yaitu perbedaan pilihan politik, kekerabatan, kedudukan, harga diri dan gengsi. Kondisi masyarakat Sulawesi selatan khususnya Kabupaten Pinrang seperti yang dikatakan tadi bahwa mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokalnya, konsep dimana status kebangsawanan masih begitu kental terlihat. Semakin tinggi status kebangsawan orang biasanya dibarengi dengan semakin banyak juga pengikutnya, hal ini merupakan suatu kondisi wajar dari berlakunya hukum adat.

Hal inilah yang kemudian melandasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul peran elite adat pada pilkada Kabupaten Pinrang 2018. Dimana perilaku politik dalam ranah pemilu merupakan suatu kajian yang menarik apalagi dengan perpaduan aksi politik oleh elite adat dalam mencapai tujuan politiknya. Peneliti kemudian hendak melakukan penelitian terhadap alasan elite adat berkecimpung dalam dunia politik, peran dan strategi mereka dalam proses pilkada, serta pola adaptasi elite adat dalam bertindak pada pemilu Kabupaten Pinrang 2018.

Peranan

Peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan (Soekanto, 2012: 212-213).

Elite adat

Untuk menganalisa penelitian ini peneliti menggunakan pemikiran *Suzanne Keller* tentang peranan elite tradisional. Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik (Suzanne Keller 1995:28). Jika mengacu pada elite lokal adalah individu yang memegang peran penting dalam keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal.

Bangsawan

Bangsawan merupakan keturunan orang-orang mulia terutama raja dan kerabatnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:77). Dalam pengertian tersebut bangsawan juga bisa diartikan sebagai priayi. Priayi adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial

dalam golongan bangsawan.

Politik Lokal

Politik merupakan usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Politik lokal merupakan unsur utama politik nasional. Sedangkan daerah merupakan elemen dasar sebuah Negara. Tanpa daerah Negara tidak mungkin ada. Tanpa politik lokal, politik nasional tidak mungkin lahir. Berbagai ruang mikro-politik, baik dalam bentuk desa, suku, kampung dan lainnya, apabila menjalani interaksi yang sangat intensif maka terbentuklah segera ruang makro politik yaitu Negara (Abdul Halim, 2014:5)

Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut (Muller, 1973, dalam Nimmo, 1993) adalah hasil apabila mereka menekankan pada hasil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Maleong (1990: 5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit-unit yang diteliti

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang peran elite adat dalam pemilu, serta realitas kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Pinrang dalam memaknai politik. Teknik yang digunakan adalah pengamatan langsung.

Peneliti terjun serta secara langsung di lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan informasi valid tentang peran elite adat pada pemilu Kabupaten Pinrang. Pengamatan terlibat di lapangan ditopang pula dengan penggunaan alat perekam data, khususnya rekaman video dan foto.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara difokuskan pada pengetahuan dan pengalaman pribadi informan tentang perannya dalam kontekstasi pemilu Kabupaten Pinrang. Tujuan wawancara untuk menjangkau data tentang pendapat dan pandangan informan

tentang Peran elite adat dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pinrang.

Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terbuka dan mendalam guna menjangkau pandangan mereka tentang usaha dan peran mereka dalam mengumpulkan serta mempengaruhi massa untuk berada sejalan dengan pandangan dan arah perpolitikan mereka. Selain pengamatan dan wawancara, peneliti juga merekam dan mencatat bentuk kegiatan dan peran langsung elite adat dalam konteks memperoleh dukungan dan pengaruh untuk pemilu Kabupaten Pinrang dengan menggunakan media pandang seperti video kamera dan tape recorder. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh berbagai interaksi verbal dan nonverbal.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dijadikan pelengkap dalam teknik pengumpulan data pada proses penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seputar pengambilan gambar berupa foto dan video yang berkaitan dengan peran elite adat pada pemilu Kabupaten pinrang 2018 serta gambar-gambar lain yang dapat mendukung pengambilan data pada saat penelitian.

4. Studi Literatur

Studi literatur bertujuan untuk memperkaya sumber data tentang penelitian yang sejenis. Studi literatur juga mempermudah peneliti untuk menemukan teori-teori yang dapat dijadikan penunjang penganalisisan data pada saat penulisan hasil penelitian dengan cara membaca buku sebagai penunjang pemahaman tentang upacara adat baik itu dari kumpulan berbagai pendapat yang diperoleh dari internet, jurnal, majalah, sehingga hasilnya maksimal dan terstruktur. Pada studi literatur juga dibutuhkan data-data dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari analisis, yang merupakan struktur atau peralatan yang memungkinkan untuk memilah, memilih, memusatkan perhatian, mengatur, dan menyederhanakan data (Rohidi, 2011: 234). Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh tentang peran elite adat, dipilah, diatur, digolongkan atau dikelompokkan, disusun sedemikian rupa, melalui ringkasan atau catatan-catatan secara telitei dan rinci. Data-data yang telah disaring berupa dokumen atau catatan sementara yang nantinya masih

akan ditransformasi atau direduksi kembali agar laporan akhir dapat tersusun secara lengkap.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses kedua dari kegiatan analisis, yaitu suatu penyajian sekelompok informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rohidi, 2011: 236). Penyajian data dapat berupa teks naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data tentang peran elite adat dalam pemilu Kabupaten Pinrang baik itu di pra dan pascanya secara lengkap dan jujur sesuai data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Peneliti menyajikan data-data tentang peran elite adat tersebut yang telah diklasifikasikan dan disederhanakan ke dalam bentuk teks naratif sistematis, agar dapat dipahami secara menyeluruh untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan dalam penelitian.

3. Penarikan Simpulan (Verifikasi)

Verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis data setelah reduksi dan penyajian data. Verifikasi dalam hal ini adalah apa yang oleh Rohidi (2011: 238) disebut sebagai menarik kesimpulan dan menentusahkan. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat penafsiran makna dari penyajian data, kemudian memverifikasikannya (Hadi, 2006: 80). Dalam penelitian ini, dilakukan verifikasi data melalui proses interpretasi secara etik dengan menggunakan referensi berupa teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, dan secara emik dengan berdasarkan pandangan-pandangan informan yang memiliki banyak pengetahuan terkait objek yang diteliti, yaitu peran elite adat pra dan pasca pemilu Kabupaten Pinrang 2018. Adapun hasil verifikasi, tentunya masih perlu diperiksa ulang dengan melihat kembali ke lapangan, serta mendiskusikannya secara formal maupun informal melalui seminar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Elite adat dalam Pilkada Kabupaten Pinrang 2018

Ada beberapa alasan lagi, mengapa seorang elite adat ingin berkecimpung atau terjun dalam sebuah kontestasi politik atau Pilkada seperti :

a) Keharusan elite adat yang berprofesi

sebagai ASN untuk berpolitik.

Seperti pada pembahasan diatas bahwa keharusan elite adat dalam berpolitik dipicu pada bagaimana mereka ketika ingin berkarier atau menjaga asa dalam mempertahankan jabatan yang dimiliki harus mempunyai peran dalam memberikan suara dan dukungan akan massa-massanya. Untuk beberapa kasus di Kabupaten Pinrang ada banyak bertebaran mereka yang tergolong elite adat, elite adat yang berasal dari turunan kerajaan yang pernah ada dan besar di beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang. Mereka yang cenderung elite adat dan mempunyai massa dan wilayah yang menjadi modalnya atau dalam artian wilayah dimana massa mereka bertempat tinggal dan berpengaruh cenderung berprofesi sebagai ASN.

b) Menjaga kharisma dan eksistensi di masyarakat.

Pada dasarnya pengaruh seorang elite adat di zaman seperti sekarang ini sudah jauh berubah di masyarakat. Elite adat yang dulunya merupakan orang yang sangat disegani dan dihormati serta benar-benar menjadi pemimpin dan diyakini mempunyai kemampuan untuk mewakili masyarakat yang ada dibawah naungan wilayahnya sedikit demi sedikit sudah kehilangan banyak pengaruhnya dimasyarakat. Perkembangan zaman dan bagaimana berubahnya pola pikir masyarakat menjadi factor utama dari perubahan tersebut. Saat ini mereka yang mempunyai modal materi, Pendidikan dan jabatan mulai memposisikan diri mejadi elite dan masyarakatpun serta merta menjadi klien mereka dalam konsep patron dan klien.

Seorang elite adat pada dasarnya selalu ingin mempertahankan segala aspek yang dapat memisahkan kelas mereka di masyarakat, baik itu mereka yang mereka yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan maupun mereka yang bekerja swasta atau non pemerintahan. Ketika ada momen dimana mereka dapat menunjukkan kelebihanannya baik itu massa atau pengaruhnya untuk dapat dilirik dan menjadi senjata untuk memberikan profit dalam hidupnya. Adapun faktor lain yang merupakan pendorong seorang elite adat melibatkan diri dalam Pilkada atau perpolitikan yaitu :

a) Ekonomi

Faktor ekonomi dalam mendorong elite adat terlibat dalam perpolitikan sekiranya menjadi lumrah terjadi. Golongan elite adat yang mempunyai modal ekonomi yang unggul sekiranya mampu menerapkan teori simbiosis mutualism dalam melibatkan diri pada konteks

politik ini. Modal yang dimiliki sekiranya dapat dijadikan senjata untuk kandidat kepala daerah bertarung pada pilkada, akan tetapi tidak begitu saja tanpa maksud dan tujuan akan tetapi dengan mengharapkan *feedback* atau umpan balik ketika nanti telah menang.

b) Pengakuan

Pengakuan dalam hal ini adalah wujud usaha dari elite adat dalam memunculkan dan memelihara eksistensi baik itu posisi, peran dan nama besarnya di masyarakat. Dengan terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung membuat mereka terlihat dengan segala peran yang bisa dilakukan.

c) Posisi dan Jabatan

Momentum pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pinrang sekiranya menjadi wadah dalam mendapatkan posisi dan jabatan yang diinginkan dimana seorang elite adat yang mempunyai modal dan pengaruh di masyarakat mengupayakan untuk dapat terlibat dan menjadi sosok sentral dalam progres kemenangan. dengan segala upaya dan pengorbanan yang dikeluarkan sekiranya berdasar pada keinginan untuk nantinya diberikan imbalan sesuai apa yang diharapkan, salah satunya yaitu posisi dan jabatan strategis dan sesuai dengan bidang yang dikuasai.

d) Kekeluargaan

Untuk mereka golongan elite adat yang punya pengaruh besar dan modal yang besar sekiranya akan mendorong perwakilan dari mereka untuk maju dan terlibat dalam perpolitikan. Hal ini didasarkan pada bagaimana mereka ingin terlihat dalam aspek nama dan keturunan mereka. Walaupun pada hakikatnya banyak fenomena yang terjadi dimana antar keluarga dekat berbeda pilihan politik dan berimbas pada hubungan keluarga yang kurang harmonis.

Peran Elite Adat

Turun langsung ke wilayah basis massa Ketika elite adat yang mempunyai massa dan pengaruh di wilayahnya menjadi pendukung otomatis Sebagian besar dari masyarakat yang menempati wilayahnya tersebut juga telah ikut dalam pilihan politiknya sehingga mudah saja dalam menerawang peta politiknya. Kebanyakan strategi politik sebelum total kampanye menggunakan cara ini, orang-orang yang berpengaruh baik itu elite adat maupun non elite adat didahulukan untuk digaet terlebih dahulu. Jadi posisi elite ini menjadi rebutan

akan kepentingan-kepentingan didalamnya. Posisi dan peran elite adat dirasa sangat seksi di peta perebutan kekuasaan kepala daerah Kabupaten Pinrang ini.

Konsolidasi keluarga

Elite adat yang saat ini telah tersebar di berbagai lapisan masyarakat dan dengan profesi yang berbeda menjadi kekuatan tersendiri, mereka seolah membentuk pondasi kokoh dengan tanggungjawab masing-masing untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang merupakan bagian dari keluarganya. Dengan profesi yang diampuh khususnya mereka yang berada di pemerintahan dan memilii kuasa akan bawahan dan masanya membuat peran mereka dalam mengumpulkan dan menjaga suara mereka tetap terjamin. Dalam kaitannya peran elite adat pada Pilkada Kabupaten Pinrang 2018, terdapat pembagian lain mulai dari peran secara langsung dilakukan maupun peran secara tidak langsung:

a. Peran langsung

Peran secara langsung yang terlihat pada Pilkada Kabupaten Pinrang khususnya dilakukan oleh elite adat yang bekerja sebagai kontraktor yaitu sebagai pemodal atau donatur untuk mendukung segala aktivitas dimana prospeknya yaitu mendapatkan suara atau dukungan dari masyarakat.

b. Peran tidak langsung

Adapun peran tidak langsung lainnya yaitu sebagai agen dalam mensosialisasikan pemilu yang aman dan adil, pemilu yang tetap harmonis dan menjaga wilayah Kabupaten Pinrang tetap terkendali. Proses Adaptasi Elite Adat Pasca Pilkada Kabupaten Pinrang 2018

a) Kondisi saat menang

Kondisi realitas yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pinrang khususnya dengan situasi dimana elite adat yang mampu memenangkan pemilihan merujuk pada bagaimana akan tetap didahulukan atau prioritaskan mereka para elite adat yang merupakan kerabat atau keluarga dulu untuk mengisi posisi-posisi sentral dalam pemerintahannya nanti. Jadi bisa dikatakan posisi yang saat ini atau sebelum menjabatnya Andi Irwan Hamid dan masih dijabat oleh Andi Aslan Patonangi tidak begitu jauh akan berubah tentang formasi jabatan yang diduduki oleh mereka elite adat yang juga merupakan keluarga dan berjuang untuk memenangkan Andi Irwan Hamid ini untuk bisa menang dalam pilkada. Filosofi atau alasan mengapa tetap didahulukan

atau prioritaskannya keluarga adalah untuk memberikan pondasi dukungan dan pemerintahan akan pemilihan yang akan datang, jadi prospeknya bukan hanya untuk pemerintahan satu periode saja akan tetapi diperiode selanjutnya.

b) Kondisi Saat Kalah

Pada kasus kemenangan Andi Irwan Hamid dan Muhammad Alimin ini terlihat para elite adat lawan politik cenderung terkontrol dan lapang dada menerima kekalahan, mereka satu demi satu mengunjungi rumah kemenangan dan memberikan ucapan selamat sembari meminta maaf atas segala kejadian yang sekiranya lumrah terjadi pada masa pemilihan kepala daerah atau pada waktu berpolitik.

Mereka melakukannya sembari mengharapkan adanya kelumrahan dan sikap menerima dari pasangan dan tim pemenangan. Sembari menunggu pengumuman resmi dan juga serah terima jabatan mereka cenderung tetap melakukan pendekatan untuk menggali peluang-peluang yang masih memungkinkan mereka dapatkan. Mereka berusaha tetap memberikan perlindungan dan pengaruh kepada massa-massanya walaupun mereka kalah.

Kondisi dimana sanksi politik pada hakikatnya menjadi momok terbesar yang mau tidak mau akan diterima oleh mereka, momen dimana para elite adat kebanyakan berada di garisterdepan memberikan dukungan dan benar-benar sentral dalam posisi mereka menjadikan sanksi politik lekat dengan posisi mereka dalam berpolitik. Dan benar saja ada diantara mereka yang dulunya mempunyai posisi dan tempat dalam pemerintahan dimutasi atau digeser karena terlalu frontal menjadi penantang dengan wujud perlawanannya terhadap pasangan calon yang didukung penuh oleh penguasa yang sedang menjabat.

Pembahasan

Peran elite adat sekiranya bukan hanya pada proses pemilihan saja akan tetapi dimulai pada pra hingga pasca Pilkada dilaksanakan. Peran elite adat dalam Pilkada Kabupaten Pinrang sekiranya tidak sebatas pada bagaimana aktivitas mereka saat proses pemilihan saja akan tetapi, juga jauh membahas tentang pra dan pasca pemilihan kepala daerah itu sendiri. pondasi pemahaman masyarakat di Kabupaten Pinrang tentang mereka yang hanya golongan elite adat saja yang biasanya akan menjadi pemimpin membawa para golongan non elite adat yang

mempunyai massa dan modal ekonomi serta pengetahuan mengikat hubungan pernikahan dengan golongan elite adat untuk memberikan posisi yang sama dan menjadi modal untuk maju dalam pentas Pilkada.

Pra Pilkada dilakukan pemetaan atau observasi akan daerah-daerah atau wilayah dan elite adat yang berpengaruh atas daerah- daerah tersebut. Tiap elite adat mempunyai kedudukan tersendiri dan menjadi modal ditiap daerah-daerah dimana mereka berkuasa sebelumnya. Strategi politik membawa generalitas akan dominasi keunggulan suara berdasarkan dari mereka golongan elite adat dan non elite adat yang menjadi pendukung ditiap daerah, hal ini didasarkan pada bagaimana ketika mereka golongan berpengaruh telah dipegang maka daerah dimana mereka berkuasa atau memiliki massa dan modal sosial dan lainnyapun juga akan ikut dipegang.

Startegi seperti ini yang banyak dilakukan oleh mereka banyak golongan yang ingin memetakan daerah atau wilayah kekuasaannya untuk nantinya di evaluasi kembali dalam progres pemenangan. Peran elite adat pada Pilkada Kabupaten Pinrang pada hakikatnya membentuk struktur dengan fungsi masing-masing didalamnya dimana kondisi yang saat ini terjadi di Kabupaten Pinrang, mereka golongan elite adat dan mempunyai pengaruh signifikan di wilayah dimana mereka berkuasa sebelumnya berkerja atau berprofesi sebagai seorang ASN yang dengan demikian arah gerak politiknya sangat dibatasi oleh profesi serta kebijakan dan kuasa yang sedang memerintah. Kondisi di Kabupaten Pinrang sendiri terlihat timpang dalam aspek pengaruh pemerintah yang berkuasa terhadap roda politik khususnya pemilihan kepala daerah itu sendiri dikarenakan, penguasa yang saat ini sedang mengemban jabatan merupakan kerabat dekat atau keluarga dari salah satu pasangan calon kepala daerah.

Elite adat khususnya mereka yang bekerja atau berprofesi sebagai ASN terbatas serta membatasi diri dari aktivitas politik. Kondisi yang sedikit ekstrem tapi lumrah terjadi dimana ada-ada saja mereka golongan elite adat yang tetap berani dan berada digaris terdepan menjadi aktor lawan politik dari elite adat yang sudah disokong oleh hampir seluruh aktivitas pemerintahan. Mereka cenderung membiarkan atau pasrah jika jabatan yang diemban saat itu di gantikan dengan pengharapan ketika nantinya pasangan yang didukung itu menjadi pemenang,

dia akan mendapatkan posisi atau ganjaran yang lebih baik.

Pasca pemilihan kepala daerah diwarnai dengan sengitnya persaingan akan perolehan suara dan seperti yang diprediksi sebelumnya pasangan yang mempunyai keterikatan dengan pemerintahan dan juga sudah mempunyai pengalaman besar sebelumnya memenangkan kontestasi lima tahunan ini. Mereka golongan elite adat bersuka cita menyambut hasil jerih payahnya dan mereka yang dikalahkan melakukan respon yang berbedaa-beda, ada yang memberikan selamat dan mengakui kekalahan, ada pula yang melakukan perlawanan terakhir hingga di Mahkamah Konstitusi. Bagi mereka para simpatisan pendukung pasangan yang menang mulai unjuk gigi melakukan pendekatan persuasif untuk melobi dan mengharapkan posisi terbaik dimasa pemerintahan nantinya dan tentu saja mereka golongan elite adat yang juga merupakan pendukung akan tetap menjadi utama atau prioritas untuk kepentingan strategi mempertahankan dominasi untuk pemilihan kepala daerah selanjutnya.

Mereka golongan elite adat yang kalah setelah melakukan beberapa sanggahan perlawanan akhirnya menerima kekalahan dan mengucapkan selamat atas kemenangan dan menghaturkan permintaan maaf atas banyak kejadian selama masa pemilihan. Akan tetapi tidak serta merta mereka berhenti disitu saja, banyak diantara mereka yang pada akhirnya ikut melobi dan memasang strategi persuasif untuk tetap digunakan selama masa menjabatnya nanti atau setidaknya tidak menerima sanksi politik baik itu mutasi, sanksi sosial ataupun setidaknya menjaga massa-massanya serta wilayahnya agar tetap diperhatikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pra Pilkada dilakukan pemetaan atau observasi akan daerah-daerah atau wilayah dan elite adat yang berpengaruh atas daerah- daerah tersebut. Tiap elite adat mempunyai kedudukan tersendiri dan menjadi modal ditiap daerah-daerah dimana mereka berkuasa sebelumnya. Strategi politik membawa generalitas akan dominasi keunggulan suara berdasarkan dari mereka golongan elite adat dan non elite adat yang menjadi pendukung ditiap daerah, hal ini didasarkan pada bagaimana ketika mereka golongan berpengaruh telah dipegang maka

daerah dimana mereka berkuasa atau memiliki massa dan modal sosial dan lainnyapun juga akan ikut dipegang.

Peran elite adat pada Pilkada Kabupaten Pinrang pada hakikatnya membentuk struktur dengan fungsi masing-masing didalamnya dimana kondisi yang saat ini terjadi di Kabupaten Pinrang, mereka golongan elite adat dan mempunyai pengaruh signifikan di wilayah dimana mereka berkuasa sebelumnya berkerja atau berprofesi sebagai seorang ASN yang dengan demikian arah gerak politiknya sangat dibatasi oleh profesi serta kebijakan dan kuasa yang sedang memerintah. Kondisi di Kabupaten Pinrang sendiri terlihat timpang dalam aspek pengaruh pemerintah yang berkuasa terhadap roda politik khususnya pemilihan kepala daerah itu sendiri dikarenakan, penguasa yang saat ini sedang mengemban jabatan merupakan kerabat dekat atau keluarga dari salah satu pasangan calon kepala daerah.

Pra Pilkada dilakukan pemetaan atau observasi akan daerah-daerah atau wilayah dan elite adat yang berpengaruh atas daerah- daerah tersebut. Tiap elite adat mempunyai kedudukan tersendiri dan menjadi modal ditiap daerah-daerah dimana mereka berkuasa sebelumnya. Strategi politik membawa generalitas akan dominasi keunggulan suara berdasarkan dari mereka golongan elite adat dan non elite adat yang menjadi pendukung ditiap daerah, hal ini didasarkan pada bagaimana ketika mereka golongan berpengaruh telah dipegang maka daerah dimana mereka berkuasa atau memiliki massa dan modal sosial dan lainnyapun juga akan ikut dipegang. Peran elite adat pada Pilkada Kabupaten Pinrang pada hakikatnya membentuk struktur dengan fungsi masing-masing didalamnya dimana kondisi yang saat ini terjadi di Kabupaten Pinrang, mereka golongan elite adat dan mempunyai pengaruh signifikan di wilayah dimana mereka berkuasa sebelumnya berkerja atau berprofesi sebagai seorang ASN yang dengan demikian arah gerak politiknya sangat dibatasi oleh profesi serta kebijakan dan kuasa yang sedang memerintah. Kondisi di Kabupaten Pinrang sendiri terlihat timpang dalam aspek pengaruh pemerintah yang berkuasa terhadap roda politik khususnya pemilihan kepala daerah itu sendiri dikarenakan, penguasa yang saat ini sedang mengemban jabatan merupakan kerabat dekat atau keluarga dari salah satu pasangan calon kepala daerah.

Pasca pemilihan kepala daerah diwarnai

dengan sengitnya persaingan akan perolehan suara dan seperti yang diprediksi sebelumnya pasangan yang mempunyai keterikatan dengan pemerintahan dan juga sudah mempunyai pengalaman besar sebelumnya memenangkan kontestasi lima tahunan ini. Mereka golongan elite adat bersuka cita menyambut hasil jerih payahnya dan mereka yang dikalahkan melakukan respon yang berbedaa-beda, ada yang memberikan selamat dan mengakui kekalahan, ada pula yang melakukan perlawanan terakhir hingga di Mahkamah Konstitusi.

Bagi mereka para simpatisan pendukung pasangan yang menang mulai unjuk gigi melakukan pendekatan persuasif untuk melobi dan mengharapkan posisi terbaik dimasa pemerintahan nantinya dan tentu saja mereka golongan elite adat yang juga merupakan pendukung akan tetap menjadi utama atau prioritas untuk kepentingan strategi mempertahankan dominasi untuk pemilihan kepala daerah selanjutnya. Mereka golongan elite adat yang kalah setelah melakukan beberapa sanggahan perlawanan akhirnya menerima kekalahan dan mengucapkan selamat atas kemenangan dan menghaturkan permintaan maaf atas banyak kejadian selama masa pemilihan. Akan tetapi tidak serta merta mereka berhenti disitu saja, banyak diantara mereka yang pada akhirnya ikut melobi dan memasang strategi persuasif untuk tetap digunakan selama masa menjabatnya nanti atau setidaknya tidak menerima sanksi politik baik itu mutasi, sanksi sosial ataupun setidaknya menjaga massa-massanya serta wilayahnya agar tetap diperhatikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik.*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Chalik, Abdul. 2017, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990.
- Emsir.2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana Prenda Media.
- Halim, Abd, 2012, *Pergulatan Islam, Ideologi*

- dan Demokrasi*, Yogyakarta : LKiS.
- Halim, Abdul. 2014, *Politik Lokal*, Yoyakarta: LP2B.
- Haw Widjaja, 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Keller, Suzanne, 1995, *Penguasa Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rajawali.
- Maleong. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan D. 1993, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Putra, Hedy Shri Ahimsa. 2007. *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Kepel Press
- Rahman, Mas'ud Darmawan, 2014, *Puang & Daeng*, Zadhaniva Makassar & Surakarta: Publishing.
- Rush, Michael dan Philip Althoff, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman. 2015. *Perilaku Politik Elite Lokal Soppeng 2010* (Disertasi), Pascasarjana, Unm.
- Syaukani, dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Puskab.